

**PEREDARAN AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) YANG
TIDAK MEMENUHI STANDAR DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG
STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN**

Nama: Yosan Lunifianto Chaesa Aponno
Jurusan/Program Studi: Hukum/Ilmu Hukum
Pembimbing: 1. Dr. Sudiman Sidabukke, S.H., C.N., M.Hum.
2. Dr. Suhartati, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Standardisasi pada produk merupakan hal yang sangat penting di Indonesia, karena dengan adanya standar dapat memberikan suatu petunjuk yang mengarah kepada suatu kesesuaian dalam penggunaan produk bahkan secara modern akan memberikan suatu kepastian kesesuaian dalam penggunaannya. Salah satu barang yang wajib SNI adalah Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Dalam hal ini, yang sebelum diedarkan harus melalui proses uji sertifikasi dan dinyatakan telah lulus uji yang telah ditetapkan Pemerintah agar mendapatkan sertifikasi SNI, yang artinya produk tersebut telah memenuhi SNI. Apabila suatu produk tidak memiliki sertifikasi SNI, maka produk tersebut tidak memenuhi standar yang telah diteapkan dan tidak dapat diedarkan kepada konsumen karena tidak menjamin keamanan, keselamatan maupun kesehatan. Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti ini dimaksudkan untuk menganalisis mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku usaha yang memperdagangkan dan mengedarkan AMDK yang tidak memenuhi standar dan tidak memiliki sertifikasi SNI, yang mana AMDK merupakan salah satu produk olahan pangan yang wajib memenuhi standar dan memiliki sertifikasi SNI ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Kata kunci: Perdagangan, Standar Nasional Indonesia, Sertifikasi SNI, Tanggung Jawab, Pelaku Usaha Air Minum Dala Kemasan (AMDK)

**PEREDARAN AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) YANG
TIDAK MEMENUHI STANDAR DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG
STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN**

Name: Yosan Lunifianto Chaesa Aponno

Dicipline/Study Programme: Law/Law

Contributor: 1. Dr. Sudiman Sidabukke, S.H., C.N., M.Hum.

2. Dr. Suhartati, S.H., M.Hum.

ABSTRACT

Standardization of products is very important in Indonesia, because the existence of a standard can provide a clue that leads to a suitability in the use of products even in a modern manner will provide a certainty of conformity in its use. One of the items that must be SNI is Mineral Water. In this case, Mineral Water which before being circulated must go through a certification test process and are declared to have passed the test set by the Government to obtain SNI certification, which means that the product has met SNI. If a product does not have SNI certification, then the product does not meet the standards that have been issued and cannot be circulated to consumers because it does not guarantee safety, safety or health. In this regard, the researcher intended to analyze the criminal liability of business actors who trade and distribute Mineral Water not having SNI certification, which Mineral Water one of the processed foods products that must have SNI certification in terms of Law Number 7 of 2014 concerning trade law and terms of law Number 20 of 2014 concerning Standardization and Conformity Assessment.

Keywords: Trade, Indonesian National Standard, SNI certification, Responsibility, Business Actors Mineral Water